

Resiliensi Aqidah Komponen Pendidikan dalam Rekonstruksi Eksistensi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi

Siska Sulistyorini

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Email : siska.sulistyorini@uii.ac.id

Abstrak

Studi ini mengeksplorasi tentang bagaimana resiliensi aqidah sebuah perguruan tinggi dapat menjadi akar setiap aktualisasi kebijakan perguruan tinggi terutama di bidang implementasi undang-undang tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan konsep kualitatif literer dengan analisis di lapangan dimana prinsip evaluasi efektifitas komponen satuan pendidikan (madrasah) dijadikan sebagai landasan teori untuk menganalisisnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) Aqidah yang kuat seharusnya mampu menumbuhkan tata nilai yang menunjukkan kesalihan sosial di perguruan tinggi. Memulai sebuah layanan bagi para peserta didik difabel di perguruan tinggi tidak harus memiliki fasilitas yang mewah dan mahal. Justru komponen awal utama terwujudnya sebuah perguruan tinggi yang berbasis inklusi adalah ketahanan mental, ketahanan keyakinan yang akan terus memupuk komponen pendidikan di dalam perguruan tinggi tersebut untuk berlapang dada, penuh syukur dan keyakinan dalam melayani dan memberikan fasilitas terbaik bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan surat Abasa. (2) Adapun Rekonstruksi Pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi dapat dimulai dari internalisasi pemahaman civitas akademika terhadap landasan dan seluk beluk pendidikan inklusi. Pemahaman ini juga termasuk pemahaman komponen pendidikan ini terhadap keutamaan, jaminan dan janji-janji Allah yang menjalankan sunnah Rasulullah dengan tidak membedakan dalam melayani peserta didik.

Kata Kunci: Resiliensi, Komponen Pendidikan, Rekonstruksi Pendidikan Inklusi

The Resistance of Aqidah as Component of Education in Reconstruction of the Existence of Inclusive Education in Higher Education

Siska Sulistyorini

Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Indonesia

Abstract

This study explores how the resilience of aqidah of a university can be the root of every actualization of university policy especially in the field of implementation of law on the implementation of inclusive education for students with special needs. This research is a qualitative research that combines qualitative literary concepts with field analysis where the principle of evaluation of the effectiveness of educational unit component (madrasah) is used as the theoretical basis to analyze it. The results of this study are that (1) strong Aqidah should be able to cultivate a value system that shows social shift in college. Starting a service for students with disabilities in college does not have to have luxurious and expensive facilities. It is precisely the first major component of the establishment of an inclusive-based college is mental resilience, the resilience of beliefs that will continue to foster the educational component within the college to be graceful, grateful and confident in serving and providing the best facilities for prospective learners with special needs based on letters Abasa. (2) The Reconstruction of Inclusive Education in Higher Education can be started from the internalization of the academic community's understanding of the foundation and ins and outs of inclusive education. This understanding also includes the understanding of this educational component of the virtues, guarantees and promises of God who observe the Sunnah of the Prophet with no discrimination in serving learners.

Keywords: Resilience, Components of Education, Reconstruction of Inclusive Education

PENDAHULUAN

Ijtihad pemerintah untuk dapat setara dengan negara-negara lain terlihat dengan banyaknya kegiatan peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dalam berbagai sektor. Sektor pendidikan yang merupakan bagian dari bahasan umum merupakan topik pembicaraan hangat yang tidak jarang membuahkan kerjasama di bidang peningkatan kualitas pendidikan. Penerimaan dan pelayanan prima terhadap peserta didik difabel

saat ini merupakan salah satu indikator kekuatan, kualitas dan ketahanan mental sebuah satuan pendidikan.¹

Memang akhir-akhir ini pemerintah berusaha untuk menunjukkan disparitas diskursus bahwa pemerintah peduli dengan kaum difabel dengan aktifasi sejumlah pusat-pusat layanan bagi penyandang disabilitas.² Sejumlah layanan siswa difabel dibangun oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi siswa difabel. Namun jika ditinjau ulang hal ini hanya seperti ini menggugurkan kewajiban pemerintah untuk sedikit memperhatikan kesetaraan layanan dengan pemerataan pendidikan kepada kaum difabel.

Secara terbuka, indikasi bahwa pemerintah benar-benar menggaungkan gerakan serentak untuk mendukung pendidikan inklusi belum dapat dirasakan dengan jelas. Hasil data statistik, layanan jumlah sekolah khusus resmi hanya sampai sekolah dasar dan itu pun hanya di beberapa tempat yang minim. Secara aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini pun relatif terbatas di Indonesia. Ambil contoh misalnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah difabel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2011 adalah 35.264 orang, dan untuk Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 3.353 orang atau sekitar 9.51 % dari total jumlah

1 Satuan Pendidikan adalah istilah umum untuk sekolah, MTs, MA maupun perguruan tinggi.

2 Proses ini sesungguhnya telah dimulai sejak lama. Sekitar 50-an tahun yang lalu atau sekitar tahun 1960-an, proses menuju pendidikan inklusif bagi anak luar biasa di Indonesia hakekatnya sudah berlangsung, yaitu ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum. Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Lihat Didi Tarsidi, "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia." (The 8th International Congress on Including Children with Disabilities in the Community, Stavanger, Norway, 2003); dalam Sunardi dan Sunaryo, "Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, Dan Implementasinya)," *JASSI ANAKKU* Vol. 10, no. 2 (2011): hlm. 191-192, <http://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/view/3990>.

kelompok berkebutuhan khusus di DIY.³ Melihat jumlah yang cukup banyak, sebagai kota pendidikan, sudah seharusnya Yogyakarta memberikan pelayanan kemudahan akses bagi para peserta didik difabel. Yogyakarta telah berusaha untuk memfasilitasi difabel dengan mendirikan sejumlah pusat layanan difabel di kota.⁴ Pemerintah kota mendirikan Unit Pelayanan Terpadu Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource center. UPT khusus siswa-siswi penyandang disabilitas itu menempati sebuah gedung yang terletak di bagian SDN pujokusuman.

Layanan tersebut dibentuk dengan payung hukum Peraturan Walikota No 96 Tahun 2016 yang merupakan UPT pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan disabilitas dan resmi beroperasi pada bulan Januari 2017. Jika di lihat sekilas, pelayanan ini merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi jika di analisis rasio antara sarana yang diberikan dengan jumlah peserta didik yang merupakan 9% dari jumlah seluruh warga Yogyakarta, dapat disimpulkan tingkat keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi kaum difabel masih terhitung lemah.

Terkait dengan kinerja pemerintah tersebut, salah satu dosen pembangunan sosial dan kesejahteraan (PSdK) FISIPOL UGM, Danang Arif Darmawan, menilai kehadiran negara masih kurang dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dengan masih adanya diskriminasi yang dialami difabel dalam memanfaatkan berbagai layanan publik dan pemenuhan hak-haknya.⁵ Belum lagi di tingkat perguruan tinggi. Di Indonesia, dapat dikatakan secara resmi bahwa universitas yang memberikan layanan bagi calon mahasiswa difabel hanya ada dua, yakni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Brawijaya Malang.

3 "Ringkasan Penelitian Pelayanan Publik Bagi Difabel di kota Yogyakarta.," , [http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/penelitian/Ringkasan+Pelayanan+Publik+Bagi+Difabel+di+K](http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/penelitian/Ringkasan+Pelayanan+Publik+Bagi+Difabel+di+Kota+YK.pdf)

4 Liputan6.com, "Hore, Pemkot Yogyakarta Luncurkan Layanan Khusus Siswa Difabel," liputan6.com, diakses 1 Juni 2017, <https://www.liputan6.com/regional/read/2792159/hore-pemkot-yogyakarta-luncurkan-layanan-khusus-siswa-difabel>.

5 Ika, "Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi," Universitas Gadjah Mada News, Desember 2015, <http://www.ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang.disabilitas.masih.mengalami.diskriminasi>.

Tulisan ini merupakan hasil akumulasi data dan kompilasi kontemplasi dari hasil penelitian-penelitian tentang studi difabilitas sejak tahun 2012. Studi sebelumnya pernah dilakukan oleh penulis pada tahun 2009 dalam rangka membantu sejumlah mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Lalu dilanjutkan oleh studi metode pengajaran yang dilakukan oleh penulis sejak 2009 hingga 2014 selama penulis mengajar bahasa Inggris terpadu di Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁶

Serta beberapa studi lanjutan yakni pada tahun 2015 di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga yang berkonsentrasi pada pembangunan, proses manajemen, volunterisme, serta pengembangan kegiatan PLD. Terakhir adalah studi tentang aksesibilitas difabel di Abu Dhabi selama 3 hari di bulan Maret 2016, studi layanan difabel di Mekkah dan Madinah selama bulan Januari 2017, studi aksesibilitas layanan umum dan pendidikan di pusat pendidikan Islam dan tempat umum di Singapura selama bulan Januari sampai Maret 2017 yang saat ini dalam proses *data reduction*.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana resiliensi aqidah perguruan tinggi dapat mempengaruhi dalam mengaplikasikan undang-undang pemerataan pendidikan. Dan bagaimana sebuah perguruan tinggi dapat mengambil peran dalam mensukseskan pendidikan inklusi ini dengan metode yang sederhana dan tidak sesukar yang sering di bayangkan dan dibahas sehingga banyak institusi yang membuat alibi untuk memulai kepeduliannya pada kaum disabilitas.

PENELITIAN SEBELUMNYA

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Anisah Budiwati berjudul *Developing Inclusive Campus in Yogyakarta*, Studi tentang bagaimana pendirian dan evaluasi terhadap karakter pendidikan inklusi ini merupakan studi penelitian lapangan di PLD UIN Sunan Kalijaga dengan ulasan dan analisis berkerangka teori perjanjian Salamanca yang berjumlah 13 butir. Studi yang dilakukan selama tiga bulan ini telah dipresentasikan di

⁶ Hasil penelitian ini selanjutnya dipublikasikan di International Conference on Inclusive Education, Abu Dhabi University, 15-17 Maret 2016. Lihat Siska Sulistyorini, "Inclusive Language Class Practice at State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta" (International Conference on Inclusive Education, Abu Dhabi University, Uni Emirat Arab (UEA), 2016).

International Conference on Inclusive Education di Abu Dhabi University, Abu Dhabi 15-17 Maret 2016.⁷

Hasil yang diperoleh adalah dimana dengan berbagai factor, yakni ekonomi, pemahaman publik, politik, maka PLD UIN Sunan Kalijaga belum dapat sepenuhnya mengaplikasikan karakter kampus inklusi karena ada beberapa karakter yang belum dapat dipenuhi. Studi ini berbeda dengan telaah yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini karena penelitian lebih berfokus pada analisis mengenai pola pikir perguruan tinggi terhadap pendidikan inklusi yang pada akhirnya akan memperngaruhi kebijakan akomodatif-non akomodatifnya terhadap para peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat perguruan tinggi.

Studi kedua adalah studi tentang aplikasi kebijakan pendidikan inklusi di perguruan tinggi karya Akhmad Sholeh. Pembahasan dalam penelitian tersebut adalah seputar aksesibilitas pendidikan di perguruan tinggi di empat perguruan tinggi negeri di Yogyakarta; yaitu Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Sampai saat ini, kelompok masyarakat yang menyandang disabilitas masih belum memperoleh persamaan dan kesempatan dalam mengakses pada pendidikan tinggi. Hanya sedikit mahasiswa penyandang disabilitas yang diterima pada Perguruan tinggi di Indonesia, karena keterbatasan fisik yang akan mengganggu proses belajar-mengajar di kelasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di UGM, UNY, dan ISI memiliki sistem “integrasi”, sedangkan di UIN telah memiliki sistem inklusi, yang “akomodatif”, dan mampu memberi layanan mahasiswa penyandang disabilitas.⁸

Studi ketiga adalah penelitian tentang kebijakan pendidikan inklusi di perguruan tinggi karya Rainda Abdi, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gad-

7 Anisah Budiwati dan Siska Sulistyorini, “Developing Inclusive Campus in Yogyakarta” (International Conference on Inclusive Education, Abu Dhabi University, Uni Emirat Arab (UEA), 2016).

8 Akhmad Soleh, “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3, no. 1 (2014): hlm. 1-30, <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.1-30> Diakses pada tanggal 09 Juni 2017.

jah Mada.”⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di perguruan tinggi di Indonesia. Aspek yang diteliti meliputi; lembaga pelaksana kebijakan, interpretasi kebijakan, implementasi kebijakan dan dampak serta penerimaan dari kebijakan. Penelitian ini dilakukan di tiga perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Gadjah Mada. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif studi komparasi. Meskipun memiliki dasar peraturan yang sama mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif namun terdapat perbedaan interpretasi dalam membentuk lembaga pelaksana kebijakan.

UIN Sunan Kalijaga dengan Pusat Layanan Difabel (PLD), Universitas Brawijaya dengan Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) dan Universitas Gadjah Mada dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peduli Difabel. Aspek implementasi kebijakan pada tiga lokasi tersebut masih terdapat kekurangan pada segi *content of policy* sementara pada sisi *context of implementation* dapat dikatakan baik. Dampak kebijakan menunjukkan tren naiknya minat pendaftar perguruan tinggi sementara penerimaan lingkungan menunjukkan hasil yang positif yaitu mulai diterimanya keberadaan difabel diantara mahasiswa perguruan tinggi negeri yang diteliti.

Telah banyak penelitian mengenai eksistensi pendidikan inklusi sebelumnya. Namun hasil observasi penulis adalah banyak arah penelitian ditujukan pada pendidikan menengah ke bawah. Adapun penelitian di bidang difabel di tingkat perguruan tinggi banyak menggunakan Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai subjek penelitian dikarenakan bisa dikatakan dari sekian banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga satuan pendidikan dianggap mewujudkan pendidikan tinggi berbasis inklusi yang tidak hanya menerima calon mahasiswa non-difabel, tetapi juga calon mahasiswa difabel dengan seleksi khusus.

Adapun penelitian di kampus lain dan sejumlah satuan pendidikan sejenis mengarahkan penelitiannya paling banyak ke arah aksesibilitas bagi

9 Rianda Abdi, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada” (Universitas Gadjah Mada, 2015), http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=88678&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html Diakses pada tanggal 09 Juni 2017.

peserta didik. Hal ini berbeda dengan fokus penelitian kali ini yang secara spesifik menganalisis tentang presedensi pengambilan kebijakan akomodasi dan aksesibilitas perguruan tinggi bagi peserta didik dan calon peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga penelitian ini dapat menjadi alternatif diskrus mengenai arah pengembangan pendidikan inklusi di Indonesia dan di ranah perguruan tinggi khususnya.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Aqidah

'Aqidah (الْعَقِيدَةُ) menurut bahasa Arab (etimologi) berasal dari kata *al-'aqdu* (الْعُقْدُ) yang berarti ikatan, *at-tautsiiqu* (التَّوَثُّيقُ) yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, *al-ihkaamu* (الإِحْكَامُ) yang artinya mengokohkan (menetapkan), dan *ar-rabthu biquw-wah* (الرَّبْطُ بِقُوَّةٍ) yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah (terminologi): 'aqidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya.

'Aqidah Islamiyyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari Akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang Prinsip-prinsip Agama (Ushuluddin), perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' (konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita-berita *qath'i* (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma' Salafush Shalih.¹⁰

Dengan aqidah yang kuat, maka keyakinan seseorang akan melahirkan tata nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa semua hal dari dan untuk Allah. Aqidah yang kuat juga melahirkan keyakinan dengan tata nilai kesadaran dalam profesionalitas setiap perilakunya.

10 AF Djunaedi dan Siska Sulistyorini, "The Actualization of Aqeeda in Professional Work Ethos of Academic World," in *Proceedings of the IIER International Conference (99TH THE IIER INTERNATIONAL CONFERENCE, Mecca, Saudi Arabia, 2017)*, <http://www.worldresearchlibrary.org/proceeding.php?pid=706> Diakses pada Juni 2017.

2. Komponen Pendidikan Islam

Komponen-komponen pendidikan Islam meliputi beberapa aspek, yaitu: Tujuan, metode, materi, peranan guru, kedudukan peserta didik, serta pengaruh lingkungan di dalamnya.¹¹ Biasanya disingkat PATAL (Pendidik, Anak didik, Tujuan Pendidikan, Alat Pendidikan (Sarana-Pra sarana), dan lingkungan pendidikan, untuk mempermudah mengingat istilahnya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

a. Pendidik (*Murobbi, Murobbiyah*)

Pendidik atau dalam istilah pendidikan islam *murobbi* atau *murobbiyah* adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan mala petaka baginya, masyarakat dan alam sekitarnya.¹²

b. Anak Didik atau Peserta Didik

Secara umum pengertian peserta didik dalam Pendidikan Islam, adalah anak yang sedang berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan.¹³

c. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan Pendidikan menurut 'Athiyah dapat disarikan dalam lima asas pokok yaitu: (a) Pendidikan akhlak, (b). Mengutamakan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, (c). Mengutamakan asas-asas manfaat, (e). Mengutamakan ketulusan/ keikhlasan, (d). Mengutamakan pendidikan ketrampilan untuk membekali peserta didik mencari rizki.¹⁴

11 Juwariyah, "Pengertian Dan Komponen-Komponen Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi (Tinjauan Analisis Kritis)," *Jurnal Mukaddimah* Vol. XV, no. 26 (2009): hlm. 77, <https://doi.org/http://digilib.uin-suka.ac.id/8623/10/medium.jpg>.

12 Fu'ad Arif Noor, "Tanggung Jawab Pendidik Terhadap Pendidikan Fisik Dan Psikis Anak Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Studi Islam : Manarul Qur'an* Vol. 17, no. 1 (2017): hlm. 53-82.

13 Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 137.

14 Juwariyah, "Pengertian Dan Komponen-Komponen Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi (Tinjauan Analisis Kritis)," hlm. 81.

d. Metode Pendidikan Islam

Metode Pendidikan Islam Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali, Ibnu Sina dan juga Ibnu Khaldun, 'Athiyah alAbrasyi telah menetapkan kaidah-kaidah dasar dalam pendidikan Islam sebagai berikut: (a). Tidak memberikan batasan usia kapan anak harus mulai belajar, (b). Menjamin kebebasan peserta didik untuk memilih dan menentukan disiplin ilmu yang akan ditekuni sesuai dengan bakat dan kecenderungannya, (c). Perlunya diadakan perbedaaan metode mengajar bagi anak-anak dan orang dewasa, (d). Tidak dimungkinkannya seorang pendidik mengajarkan dua disiplin ilmu yang berbeda dalam waktu yang sama, (e). Adanya tuntutan bagi para pendidik untuk senantiasa mengikuti perkembangan peserta didiknya baik secara fisik, psikis, motorik maupun kognitifnya.

e. Lingkungan Pendidikan

Mahmud Yunus telah merinci tempat/lingkungan pendidikan bagi anak menjadi empat kriteria yaitu: (a) Rumah/tempattinggal, (b) Sekolah, (c) Tempat bermain, dan (d) Lingkungan pergaulan.¹⁵ Lebih dari itu, ia menambahkan bahwa lingkungan bermain serta lingkungan dimana anak didik tinggal sangat bisa jadi memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pembentukan karakter kepribadian anak didik, hal itu dikarenakan waktu yang dilalui anak di lingkungan tempat tinggal serta lingkungan bermain lebih lama daripada waktu yang dia habiskan di sekolah /lembaga pendidikan.¹⁶

3. Membangun Perguruan Tinggi Inklusif

Upaya membangun perguruan tinggi inklusif yang mengakomodasi difabel dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perubahan struktur institusi, promosi nilai keterbukaan, dan produksi pengetahuan inklusif.

15 Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1978), hlm. 27.

16 Juwariyah, "Pengertian Dan Komponen-Komponen Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus Dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi (Tinjauan Analisis Kritis)," hlm. 82.

Tahap pertama dilakukan dengan menghilangkan batasan yang selama ini menghalangi terjadinya inklusi pada perguruan tinggi. Tahap kedua dilakukan dengan membangun lingkungan kampus yang membuka wawasan lebih inklusif termasuk bagi para difabel. Sedangkan pada tahap ketiga, produk pengetahuan yang mengakomodasi inklusivitas di kampus mulai ditumbuhkembangkan.¹⁷

Perkembangan terkini juga menunjukkan komitmen difabel di perguruan tinggi melalui inisiatif bertajuk *universal design university* atau universitas berdesain universal. Secara sederhana *universal design university* merupakan aplikasi dasar-dasar arsitektur yang memberikan akses ke perguruan tinggi bagi semua orang.¹⁸ Di tingkat internasional upaya mengakomodasi difabel dalam pendidikan juga diwujudkan dalam bentuk *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UN CRPD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi yang telah diratifikasi oleh 177 negara ini menekankan akses bagi pendidikan yang inklusif di berbagai level, termasuk dalam perguruan tinggi.¹⁹

Dari komponen-komponen pendidikan yang seringkali di bahas para pakar pendidikan, komponen pendidikan yang di bahas oleh peneliti adalah komponen lingkungan pendidikan. Dalam buku-buku ilmu pendidikan Islam, lingkungan pendidikan diletakkan di bagian paling belakang dan mendapat sedikit sekali pembahasan, dimana pada kenyataannya, keberadaan lingkungan bisa jadi merupakan bagian yang menentukan kualitas pendidikan di sebuah negeri.

17 Marie Fleming, "The inclusive university and the problem of knowledge," dalam *Academic freedom and the inclusive university*, ed. oleh Sharon E. Kahn dan Dennis Pavlich (Toronto, Canada: UBC Press, 2000), hlm. 128-135.

18 Justin P.W. Powell dan Lisa Pfahl, "Disability studies in the universal design university," in *Diversity and inclusion in higher education and societal contexts: International and interdisciplinary approaches*, ed. oleh SunHee Kim Gertz, Betsy Huang, dan Lauren Cyr (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), 157-188.

19 United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," *Department of Economic and Social Affairs* (blog), 2016, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

HASIL DAN DISKUSI

1. Resiliensi Aqidah Komponen Pendidikan Perguruan Tinggi

Dari komponen-komponen pendidikan yang seringkali di bahas para pakar pendidikan, komponen pendidikan yang di bahas oleh peneliti adalah komponen lingkungan pendidikan. Dalam buku-buku ilmu pendidikan Islam, lingkungan pendidikan diletakkan di bagian paling belakang dan mendapat sedikit sekali pembahasan, dimana pada kenyataannya, keberadaan lingkungan bisa jadi merupakan bagian yang menentukan kualitas pendidikan di sebuah negeri.

Lingkungan pendidikan Islami banyak dikaitkan dengan tri pusat pendidikan yang terdiri dari (1) Rumah; (2) Sekolah; dan (3) Masyarakat. Tidak jauh dari konteks sebelumnya, lingkungan pendidikan Islam juga menjadikan rumah (*al-Bait*) sebagai asas pokok dalam permulaan pendidikan yang utama bagi pembentukan aqidah dan akhlaq peserta didik.

Lebih lanjut setelah itu peneliti melakukan analisis madrasah memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi dan fitrah peserta didik. Karakter-karakter madrasah yang menyuguhkan pola asuh dan pola didik yang berbeda-beda pada masing-masing satuan pendidikannya menjadikan orang tua memilih madrasah tersebut berdasarkan visi dan misi, persepsi dan animo orang tua terhadap sekolah tersebut.

Namun di luar daripada itu, dalam dunia pendidikan, pendidikan di madrasah memegang peranan yang sangat penting bagi pembentukan karakter peserta didik. Secara formal lingkungan pendidikan madrasah ini diejawentahkan dalam bentuk lembaga pendidikan mulai dari dasar seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), dan pendidikan yang lebih tinggi seperti Institut Agama Islam (IAI) atau STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam).

Diskursus tentang peran perguruan tinggi dalam menentukan kemajuan generasi bangsa dan hubungannya dengan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan tidak terkecuali peserta didik berkebutuhan khusus dengan pendidikan inklusif menarik untuk diperdalam. Sehingga pemahaman perguruan tinggi tentang aplikasi UUD RI 1945

semakin terarah. Akan tetapi pada kenyataannya, dari sekian banyak perguruan tinggi di Indonesia, hanya beberapa saja yang secara terbuka dan instensif menerima calon mahasiswa berkebutuhan khusus seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Pusat Layanan Difabel (PLD) nya dan Universitas Brawijaya Malang dengan Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD)nya.²⁰

Lambatnya respon terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, dapat dianalisis mengapa banyak perguruan tinggi di Indonesia bersifat pasif dalam menyambut program pendidikan inklusif ini. Hasil observasi peneliti menyatakan bahwa perguruan tinggi umumnya bersifat pasif dengan tidak menyediakan jalur khusus dan layanan khusus baik *direct services* maupun *indirect services* bagi calon peserta didik difabel. Padahal sangat niscaya jika peserta yang masuk secara fisik normal sebenarnya memiliki keterbatasan di bidang lain misalnya keterbatasan di bidang pemahaman pelajaran atau keterbatasan mental. Sehingga banyak terjadi setelah masuk di lingkungan kampus yang bertipe seperti ini, peserta didik semacam ini tidak terdeteksi dan cenderung menjadi penghambat bagi peserta didik lain karena para dosen menganggap dia sama sehingga memperlakukannya secara sama dengan peserta didik yang lain.²¹

Diversitas anak yang mengalami keterbatasan yang dijelaskan oleh US Departemnt of Education, 2000 adalah (1) Ketidakmampuan belajar; (2) Gangguan bicara dan bahasa; (3) Retardasi Mental; (4) Gangguan Emosional; (5) Gangguan Bermacam macam; (6) Gangguan Pendengaran/ Tuna Rungu; (7) Gangguan Ortopedik (Tuna Daksa); (8) Gangguan Kesehatan lainnya; (9) Gangguan Penglihatan (10) Autisme; (11) Buta-Tuli; (12) Cidera Otak Traumatik; (13) Keterlambatan Perkembangan.²²

20 Abdi, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada," hlm. abstrak.

21 Hasil observasi peneliti tahun 2015 terhadap mahasiswa PAI UII dengan inisial A yang diduga memiliki kesukaran menerima pelajaran yang pada praksisnya dia sukar berkomunikasi dengan teman sebaya dalam bekerja sama melakukan pembelajaran kelompok atau dalam rangka melakukan tugas. Resistensi dan *Self Defence Mechanism* nya di hadapan dosen dilakukan dengan tidak mau melakukan tugas yang dianggap membebani dan memberikan banyak alasan. Awalnya pada dosen tidak memahami, lalu setelah melakukan wawancara dengan orang tuanya, dapat dipahami bahwa si A mengalami kesulitan belajar karena jaringan syaraf yang bermasalah.

22 US Department of Education, 2000, *To Assure a Free and Appreciate Public Education of all children with Dissabilities*, Washington DC., Office of Education.

Dari kategori di atas, dapat di analisis bahwa sebagian perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan pelayanan khusus bagi peserta didik difabel juga tidak lepas dari *input* disabilitas yang sifatnya tidak dapat dilihat kasat mata. Intensitas ketidakmampuan atau gangguan belajar sangat bervariasi.²³ Diagnosis pada penderita kesukaran belajar yang ringan sangat sulit. Karena anak yang menderita ketidakmampuan belajar biasanya tidak terlalu tampak,²⁴ terlihat biasa biasa saja dan kadang tidak menarik diri dari lingkungannya.

Adapun jumlah peserta didik difabel semakin bertambah setiap tahun. Selain karena faktor teknologi, kurang gizi dan gen, klasifikasi diversitas peserta didik difabel semakin mengalami perluasan. Sehingga ketika ditinjau dilapangan, variabel-variabel metafisik yang baru tersebut menjaring lebih banyak peserta didik yang pada gilirannya masuk dalam karegori variabel yang baru tersebut.

Studi mutakhir tentang efektivitas pendidikan dalam integrase, dalam sumbangannya terhadap peragaan konseptual tentang efektifitas sekolah, sekolah dilukiskan sebagai seperangkat lapisan yang tersimpan (*nested layers*)²⁵ dimana asumsi pokoknya adalah bahwa tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan kondisi bagi peningkatan efektivitas pada tingkat yang lebih rendah.²⁶ Oleh karena itu, sintesis antara fungsi produksi, efektifitas pengajaran, dan efektifitas sekolah menjadi niscaya di dalam dunia pendidikan.

Efektivitas organisasi atau satuan pendidikan (sekolah/ kampus) adalah kadar yang dimiliki sebuah organisasi yang didasarkan pada manajemen yang kompeten, sambil menghindari usaha yang tidak perlu, di dalam lingkungan tempat dimana organisasi beroperasi yang kurang lebih kompleks, mengelola untuk mengontrol kondisi internal dan lingkungan organisasi, dalam rangka

23 Daniel J. Reschly, "Identification And Assessment of Students With Disabilities," *The Future of Children* Vol. 6, No. 1 (1996): Hlm. 40-53, <https://doi.org/10.2307/1602493>.

24 John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), hlm. 231-232.

25 Purkey dan Smith, 1983, dalam Suharno, *Manajemen Pendidikan* (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), hlm. 141.

26 J Scheerens, *Improving School Effectiveness*. (Paris: UNESCO. International Institute for Educational Planning (IIEP), 2000).

menunjukkan demi proses transformasi dirinya sendiri demi output yang diharapkan oleh kentituen eksternal.²⁷

Ditinjau dari studi efektifitas sekolah atau satuan pendidikan, maka efektifitas dapat di gambarkan dalam peta sejauh mana tingkat hasil (*output*) yang diinginkan tercapai. Sedangkan efisiensi bisa di definisikan sebagai tingkat *output* yang diinginkan dengan kemungkinan biaya yang paling rendah. Dengan kata lain, efisiensi adalah efektifitas dengan keperluan tambahan yang ingin dicapai dengan menempuh kemungkinan cara termurah.²⁸ Elaborasi ini, lebih jauh akan membawa pada proyeksi output jangka pendek dan output jangka panjang.

Manakala sebuah perguruan tinggi menganut paham efisiensi satuan pendidikan ini dengan maksud menjaga efisiensi kinerja kampus dengan mengurangi tingkat kualitas *input* peserta didik yang dinilai berpengaruh terhadap kinerja dan efektifitas perguruan tinggi. Maka dapat di analisis bahwa perguruan tinggi mengambil resiko terendah untuk menyelamatkan dirinya dari kerepotan menerima input peserta didik. Jika memang beginilah ketahanan iman dan aqidah komponen sebuah organisasi pendidikan di tingkat perguruan tinggi, maka wajar jika pada taraf praksisnya perguruan tinggi ini kemudian bersikap pasif dalam merespon program pendidikan inklusif.

Perguruan Tinggi terdiri atas komposisi kompleks civitas akademika (Pimpinan, Manajemen, Pemangku Jabatan, dan Penentu Keputusan Kebijakan dan Komponen Lainnya) yang juga mempunyai konsep Tauhid yang seharusnya mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang mengapa sekelas perguruan tinggi belum mau memberikan aksesibilitas prima terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Konsep ini kemudian membawa kepada terminologi Tauhid Sosial yang muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan.²⁹

Analisis yang kemudian dikembangkan dari studi Islam mencoba mengingatkan kembali tentang asbabun nuzul turunnya surat 'Abasa.

27 Suharno, *Manajemen Pendidikan*, hlm. 155.

28 Cheng, Y.C. *Conceptualization and Measurement of School Effectiveness: an Organizational Perspective*, Atlanta: AERA paper, 1993.

29 M. Amien Rais, *Tauhid Sosial : Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 36 dan 43.

Dimana pada saat itu Rasulullah SAW menolak seorang difabel dengan kesulitan penglihatan (Buta) yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dimana Allah segera menegur sikap Nabi yang dianggap eksklusif dan enggan menerima seorang dengan keterbatasan penglihatan.

2. Rekonstruksi Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi

Menjalankan sebuah organisasi lembaga pendidikan sesuai dengan visi misi dan tata nilai yang telah dibuat berarti suatu satuan pendidikan telah melaksanakan kewajibannya yakni amanah terhadap apa yang diamanahkan. Untuk menjamin suatu amanah dapat terlaksana dengan baik. Maka sistem evaluasi pendidikan hendaknya dijalankan secara komprehensif sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap amanah yang telah diberikan.

Teologi Islam bersifat aktual, karena pernyataan iman kepada Allah tidak berhenti pada dataran lisan, tetapi juga pikiran, hati dan perbuatan.³⁰ Jika diintegrasikan dengan ilmu psikologi pendidikan, maka taksonomi Benyamin Bloom yang berada pada ranah kognisi, afeksi, psikomotorik bisa dikatakan sejalan dengan konsep tersebut. Aspek khusus yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan Islam dapat digunakan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap konstruksi pendidikan inklusi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dilakukan dalam rangka membangun pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

a. Rekonstruksi Ranah Kognitif Pendidikan Inklusi

Perguruan tinggi hendaknya mengkaji kembali tentang landasan dasar seperti landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris dari konstruksi pendidikan inklusi. Pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk pendidikan inklusi akan melahirkan pola pikir dan perumusan tata nilai baru tentang persepsi pendidikan inklusi.

³⁰ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi Dalam Berpikir* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2002), hlm. 183.

b. Rekonstruksi Ranah Afeksi Pendidikan Inklusi dalam Jiwa Perguruan Tinggi.

Memahami nilai rasa terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, perguruan tinggi perlu memahami bagaimana cara pandang Allah dalam merespon keberadaan peserta didik berkebutuhan khusus dalam peristiwa *asbabun nuzul*³¹ al-Quran surat 'Abasa :

(1) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, (2). Karena Telah datang seorang buta kepadanya. (3). Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), (4). Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? (5). Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. (6). Maka kamu melayaninya. (7). Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). (8). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (9). Sedang ia takut kepada (Allah), (10). Maka kamu mengabaikannya. (11). Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, (12). Maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperliatkannya, (13). Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (QS. Abasa: 1-11)

Teguran ini menjadi pelajaran bagi Nabi untuk tidak membedakan peserta didik. Teguran ini secara langsung diberikan Allah melalui surat 'Abasa yang juga berlaku bagi kaum muslimin karena rasul merupakan contoh (*qudwah*) sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Quran surat al-Ahzab ayat 21.

"Sesungguhnya telah ada pada diri rasulullah itu suri tauladan yang baik (yaitu) bagimu, bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"(QS. Al-Ahzab: 21)

Pemahaman aqidah dalam dimensi praksis akan melahirkan kekuatan afeksi bagi sesama. Seorang yang beriman, akan cenderung memiliki sikap yang baik terhadap sesama sebagai implementasi nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, perguruan tinggi Islam yang terdiri dari civitas akademika yang beriman hendaknya tidak hanya membaca atau mengetahui dari ranah kognisi saja, akan

31 Asbabun Nuzul: Peristiwa penyebab turunnya ayat al-Quran.

tetapi merenungkan bagaimana apresiasi Allah terhadap seseorang yang mungkin di mata manusia memiliki kekurangan fisik, tapi oleh dimuliakan karena ketaqwaannya.

Berqiyas kepada Rasulullah SAW, perguruan tinggi patut untuk memuliakan para kaum difabel, melayani mereka sebagaimana mereka melayani peserta didik non- difabel. Dan dalam menanamkan rasa cinta kepedulian terhadap sesama, perguruan tinggi perlu melakukan kontemplasi komprehensif di setiap level civitas akademik (Pengurus, Pejabat struktur, penentu kebijakan) terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dalam merespon keberadaan peserta didik difabel.³²

c. Rekonstruksi Psikomotorik dan Aktualisasi Pendidikan Inklusi

Sebagai muslim, tidaklah cukup aqidah tauhid dipahami dan dinyatakan dalam bentuk ucapan saja dan diyakini dalam hati, akan tetapi harus dilanjutkan ke dalam bentuk perbuatan. Sebagai konsekuensi kaidah ini, maka perguruan tinggi punya tuntutan untuk mengaplikasikan visi misi yang telah dibuat dalam aksi nyata. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Shaff ayat 2-3 yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kami kerjakan ” (QS. Al-Shaff: 2-3)

Dalam tatanan praksis, ayat ini menjelaskan kewajiban untuk menjalankan yang telah dikatakan. Jika dinisbatkan pada perguruan tinggi, maka ketika sebuah perguruan tinggi telah memiliki tata nilai, visi-misi, hendaknya hal tersebut diaplikasikan dalam aksi nyata. Ambillah contoh misal UII yang mempunyai visi menjadi Universitas yang Rahmatan Lil Alamin, akan tetapi pada praksisnya, UII masih belum mempunyai *Difabel Center* atau seminimnya fasilitas sederhana untuk mengakomodir kebutuhan registrasi peserta didik

³² Surat 'Abasa termasuk Surat Makkiah yang terdiri atas 42 ayat. Surat 'Abasa merupakan surat ke 80 yang turun sesudah turunnya surat An Najm. Judul surat 'Abasa diambil dari ayat pertama dari surat ini.

berkebutuhan khusus sebagai salah satu indikator implementasi dari visi ini. Sehingga dapat dikatakan UII memiliki tugas tertulis dan tak tertulis untuk mewujudkan terciptanya prinsip persamaan baik semua peserta didik tanpa terkecuali.

Jika sebuah perguruan tinggi memiliki keyakinan tidak akan rugi dengan mengupayakan pengadaan pendidikan inklusi ini walaupun dengan standar fasilitas yang sangat sederhana, maka pendidikan inklusi dapat terwujud. Karena sebagian besar komponen suksesnya aktualisasi awal dari program pendidikan inklusi ini bukan berasal dari mewahnya fasilitas terhadap para peserta didik difabel. Tapi lebih kepada sikap mental yang menurut analisis peneliti merupakan perwujudan resiliensi tauhid komponen civitas akademika dalam sebuah perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus pertanyaan yang telah dirancang dan hasil diskusi pada sub bab sebelumnya, maka kesimpulan dari studi ini adalah sebagai berikut :

1. Aqidah yang kuat Seharusnya mampu menumbuhkan tata nilai yang menunjukkan kesalihan sosial di perguruan tinggi. Memulai sebuah layanan bagi para peserta didik difabel di perguruan tinggi tidak harus memiliki fasilitas yang mewah dan mahal. Justru komponen awal utama terwujudnya sebuah perguruan tinggi yang berbasis inklusi adalah ketahanan mental, ketahanan keyakinan yang akan terus memupuk komponen pendidikan di dalam perguruan tinggi tersebut untuk berlapang dada, penuh syukur dan keyakinan dalam melayani dan memberikan fasilitas terbaik bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan surat Abasa.
2. Adapun Rekonstruksi Pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi dapat dimulai dari internalisasi pemahaman civitas akademika terhadap landasan dan seluk beluk pendidikan inklusi. Pemahaman ini juga termasuk pemahaman komponen pendidikan ini terhadap keutamaan, jaminan dan janji-janji Allah yang menjalankan sunnah Rasulullah dengan tidak membedakan dalam melayani peserta didik.

3. Penelitian ini juga merupakan preseden dari penelitian selanjutnya dimana peneliti akan mendiskusikannya dengan teori Total Quality Manajemen in Education. Sehingga rekonstruksi mental yang telah diwujudkan mampu membawa kepada aktualisasi nyata bentuk layanan terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Rianda. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada." Universitas Gadjah Mada, 2015. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=88678&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html.
- Asy`arie, Musa. *Filsafat Islam: Sunnah Nabi Dalam Berpikir*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2002.
- Budiwati, Anisah, dan Siska Sulistyorini. "Developing Inclusive Campus in Yogyakarta." Abu Dhabi University, Uni Emirat Arab (UEA), 2016.
- Djunaidi, AF, dan Siska Sulistyorini. "The Actualization of Aqeeda in Professional Work Ethos of Academic World." In *Proceedings of the IIER International Conference*. Mecca, Saudi Arabia, 2017. <http://www.worldresearchlibrary.org/proceeding.php?pid=706>.
- Fleming, Marie. "The inclusive university and the problem of knowledge." In *Academic freedom and the inclusive university*, diedit oleh Sharon E. Kahn dan Dennis Pavlich, 128–35. Toronto, Canada: UBC Press, 2000.
- Ika. "Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi." Universitas Gadjah Mada News, Desember 2015. <http://www.ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang.disabilitas.masih.mengalami.diskriminasi>.
- Juwariyah. "Pengertian Dan Komponen-Komponen Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus Dan Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi (Tinjauan Analisis Kritis)." *Jurnal Mukaddimah* Vol. XV, no. 26 (2009). <https://doi.org/http://digilib.uin-suka.ac.id/8623/10/medium.jpg>.
- Liputan6.com. "Hore, Pemkot Yogyakarta Luncurkan Layanan Khusus Siswa Difabel." liputan6.com. Diakses 1 Juni 2017. <https://www.liputan6.com>

/regional/read/2792159/hore-pemkot-yogyakarta-luncurkan-layanan-khusus-siswa-difabel.

- Muhaimin, dan Abdul Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Noor, Fu'ad Arif. "Tanggung Jawab Pendidik Terhadap Pendidikan Fisik Dan Psikis Anak Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Studi Islam : Manarul Qur'an* Vol. 17, no. 1 (2017): hlm. 53-82.
- Powell, Justin P.W., dan Lisa Pfahl. "Disability studies in the universal design university." In *Diversity and inclusion in higher education and societal contexts: International and interdisciplinary approaches*, diedit oleh SunHee Kim Gertz, Betsy Huang, dan Lauren Cyr, 157-88. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018.
- Rais, M. Amien. *Tauhid Sosial : Formula Menggempar Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Reschly, Daniel J. "Identification and Assessment of Students with Disabilities." *The Future of Children* Vol. 6, no. 1 (1996): hlm. 40-53. <https://doi.org/10.2307/1602493>.
- "Ringkasan Penelitian Pelayanan Publik Bagi Difabel di kota Yogyakarta.," n.d. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/penelitian/Ringkasan+Pelayanan+Publik+Bagi+Difabel+di+Kota+YK.pdf>.
- Santrock, John W. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Scheerens, J. *Improving School Effectiveness*. Paris: UNESCO. International Institute for Educational Planning (IIEP), 2000.
- Soleh, Akhmad. "Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.1-30>.
- Suharno. *Manajemen Pendidikan*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008.
- Sulistyorini, Siska. "Inclusive Language Class Practice at State Islamic University Sunan Kalijaga, Yogyakarta." Abu Dhabi University, Uni Emirat Arab (UEA), 2016.
- Sunardi, dan Sunaryo. "Manajemen Pendidikan Inklusif (Konsep, Kebijakan, Dan Implementasinya)." *JASSI ANAKKU* Vol. 10, no. 2 (2011). <http://ejournal.upi.edu/index.php/jassi/article/view/3990>.

Tarsidi, Didi. "The Implementation of Inclusive Education in Indonesia." Stavanger, Norway, 2003.

United Nations. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)." *Department of Economic and Social Affairs* (blog), 2016. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

Yunus, Mahmud. *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1978.